



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7739-7747

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020)

Siti Marwiyah^{1✉}, Nourma Ulva K. D², Afiat Pratama³

Universitas Panca Marga

Email: afiatpratama9@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Alokasi parkir dan masalah perparkiran termasuk pada sub system lalu lintas angkutan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pendapatan dari parkir ini akan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan kebijakan parkir berlangganan. Pemerintah Kota Probolinggo menjadi salah satu wilayah yang menerapkan kebijakan parkir berlangganan. Kebijakan ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Penerapan parkir berlangganan tertuang pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil/Sharing Pendapatan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan. Hal ini menarik untuk diteliti guna mengetahui implementasi kebijakan parkir berlangganan mampu atau tidak meningkatkan PAD di Kota Probolinggo. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Focus riset merupakan implementasi kebijakan dengan teori George C. Edwards III. hasil riset menunjukkan Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan sesuai dengan teori George C. Edwards III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: *Kebijakan, PAD, Parkir Berlangganan*

Abstract

Parking allocation and parking problems are included in the road transportation traffic sub-system which is the responsibility of the local government. Revenue from this parking will be included in the Regional Original Revenue (PAD). The strategy carried out by the Regional Government with a subscription parking policy. The Probolinggo City Government is one of the areas that implements a subscription parking policy. This policy is an effort by the local government to optimize regional potential to increase regional income as the implementation of government and regional development tasks. The implementation of subscription parking is contained in Probolinggo Mayor Regulation Number 102 of 2020 concerning Revenue Sharing of Parking Levy on the Edge of Public Roads by Subscription. This is interesting to study to find out whether or not the implementation of the subscription parking policy is able to increase PAD in Probolinggo City. The research uses descriptive qualitative research methods. The research focus is policy implementation with the theory of George C. The results of the research show that the Implementation of the Subscription Parking Policy in Increasing Regional Original Revenue (PAD) is carried out in accordance with the George C. Edwards III theory. Edwards III theory includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords: *Policy, PAD, Subscription Parking*

PENDAHULUAN

Mobilisasi masyarakat semakin lengkap dan kompleks. Khususnya dalam mobilisasi menggunakan transportasi (Salim 2013). Transporasi semakin banyak dimanfaatkan untuk kepentingan individu maupun kelompok (Nuryamin 2016). Otomatis kepemilikan kendaraan semakin meningkat setiap tahunnya (Swisti Intan Nurcahyamita 2019). Hal berdampak pada kondisi kepadatan jalan dan alokasi parkir (Rukmana and Susanti 2015).

Khusus pada alokasi parkir dan masalah perparkiran termasuk pada sub system lalu lintas angkutan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Nurachman 2023). Artinya Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan peran pelayanan dengan cakupan bidang perparkiran, menata lingkungan, menata arus lalu lintas yang tertib dan lancar, serta mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ardiansyah, Sundarso, and Yuniningsih 2016). Alasannya pendapatan dari parkir menyumbang pendapatan terbesar (Susanto, Binabar, and Maulana 2017). Bahkan PAD digunakan untuk kepentingan dan pembangunan daerah (Agung Setiadewi and Widnyani 2019). Hal ini sesuai dengan penerapan otonomi daerah yang mengarahkan Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayah kewenangan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan prinsip otonomi daerah dalam mengelola parkir menjadi wujud peran penting penyediaan pelayanan publik dan kebijakan publik (Ferisiansyah and Megawati 2022). Khususnya pada layanan parkir kendaraan sebagai retribusi daerah (Ekaryn, Herawati,

and Hariani 2022). Strategi dalam mengelola parkir dengan tepat untuk terhindar dari praktik parkir liar dan tindakan korupsi dengan menerapkan parkir berlangganan. Sehingga hasil dari parkir berlangganan dapat masuk dalam pendapat asli daerah dalam bentuk retribusi (Jiwangga 2018).

Pada penelitian terdahulu, memaparkan daerah yang telah melaksanakan parkir berlangganan yang menunjang PAD, seperti penelitian oleh (Suwandi 2019) yang menjelaskan hasil penelitian bahwa system dalam parkir berlangganan kurang efektif diterapkan dengan faktor minim sosialisasi pada masyarakat. Selain itu perlunya pengawasan ketat dari berbagai pihak guna mengawasi penerapan parkir berlangganan di Kota Batam. Penelitian kedua oleh (Balahmar 2016) yang menunjukkan hasil penerapan parkir berlangganan memerlukan peningkatan dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Namun secara umum pelaksanaan parkir berlangganan mampu memberikan pengaruh semakin meningkatnya PAD di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ketiga oleh (Susanti 2016) yang menunjukkan hasil riset bahwa pada pelaksanaan parkir berlangganan di Jember banyak perbaikan dan perlu sosialisasi yang menyeluruh dan berkala, namun untuk hasil dari parkir berlangganan berhasil merealisasikan peningkatan PAD.

Pemerintah Kota Probolinggo menjadi salah satu wilayah yang menerapkan kebijakan parkir berlangganan. Kebijakan ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penerapan parkir berlangganan tertuang pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil/Sharing Pendapatan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan. Aturan ini menekankan pada adanya penerapan parkir berlangganan di tepi jalan serta hasil dari parkir berlangganan akan di bagi hasil pada beberapa lini dan juga di masukkan pada PAD Kota Probolinggo. Hal ini menarik untuk diteliti, apakah di Kota Probolinggo pelaksanaan parkir berlangganan mampu meningkatkan PAD di Kota Probolinggo. Sehingga dapat mengetahui implementasi kebijakan parkir berlangganan mampu atau tidak meningkatkan PAD di Kota Probolinggo.

METODE PENELITIAN

Penelitian menerapkan metode riset secara kualitatif. Menurut (Moleong 2018), menjelaskan teori dari Bodgan dan Taylor merupakan prosedural riset membentuk data deskriptif. Penelitian dilakukan di Kota Probolinggo. Data dihimpun dari metode triangulasi meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan langsung oleh penulis.

Data dihimpun dengan berkala untuk memperoleh keabsahan data dengan penarikan intisari dan diverifikasi selama proses penelitian.

Focus riset merupakan implementasi kebijakan dengan teori George C. Edwards III dalam Siregar (2022) meliputi Komunikasi, Sumber daya, disposition, dan Struktur Birokrasi. Teori ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan dalam peningkatan PAD di Kota Probolinggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Parkir berlangganan di Kota Probolinggo tepat pada teori Edward III dalam Siregar (2022) pelaksanaan memuat variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara detail Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi pada proses implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan untuk peningkatan PAD di Kota Probolinggo memuat 3 proses komunikasi meliputi komunikasi dengan seluruh pihak yang membuat kebijakan; komunikasi dari pemerintah dan masyarakat; serta komunikasi pemerintah dengan pihak lainnya seperti pihak swasta dan organisasi masyarakat.

Proses komunikasi antar pihak yang menetapkan kebijakan melalui koordinasi dan adanya landasan hukum Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020. Hal ini mengatur bagi hasil dari retribusi parkir berlangganan, baik alur bagi hasil, prosentase bagi hasil, dan tujuannya. Selanjutnya proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi dan pengarahan saat proses pembayaran pajak kendaraan. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa saat masuk bagian parkir berlangganan tidak perlu membayar lagi saat parkir. Nantinya akan ada tanda khusus pada plat nomor masyarakat yang mengikuti parkir berlangganan. Sementara proses komunikasi antar pemerintah dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat dilakukan dengan koordinasi. Sehingga pihak swasta seperti pemilik took pinggir jalan tidak perlu khawatir tentang pengaturan parkir dan organisasi masyarakat tidak perlu melakukan penarikan parkir dan ikut serta melakukan pengawasan jika ada oknum yang bertindak sebagai juru parkir liar.

Pada komunikasi ini terlihat program parkir berlangganan semakin efektif saat informasi jelas, tepat, dan mudah untuk dipahami seluruh pihak. Implementasi kebijakan parkir berlangganan terlihat cukup efektif dalam kejelasan informasi, Nampak pada

kejelasan informasi setiap tahapnya mulai dari tahapan penyaluran informasi dan adanya landasan hukum yang tertuang pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil/Sharing Pendapatan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan. Artinya komunikasi yang jelas pada aturan ini, hasil dari biaya parkir yang masuk pada pemerintah akan dialokasikan tepat sasara, tepat jumlahnya, dan tepat tujuan. Semakin banyak masyarakat yang paham akan parkir berlangganan akan semakin meningkat minat pembuatan parkir berlangganan. Maka secara langsung pemasukkan parkir berlangganan akan masuk pada pemerintah daerah dalam bentuk PAD semakin tinggi dan dialokasikan sesuai sasaran.

Selain itu konsistensi informasi juga sudah diterapkan mulai dari pihak pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta serta organisasi masyarakat. Seluruhnya menerima informasi bahwa parkir berlangganan ini akan dilaksanakan dengan penetapan tanda khusus pada plat nomor dan tidak perlu membayar parkir kembali pada juru parkir. Hal ini juga menunjukkan penerapan kebijakan yang konsisten akan membentuk penilaian masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat di Kota Probolinggo sehingga berpengaruh pada tingkat minat parkir berlangganan. Maka secara langsung pemasukkan parkir berlangganan akan masuk pada pemerintah daerah dalam bentuk PAD secara langsung dan akan membentuk PAD di Kota Probolinggo terkumpul dengan tepat.

Terkait transmisi informasi melibatkan seluruh pihak dari pemerintah melalui rapat koordinasi, komunikasi pada masyarakat melalui sosialisasi, dan komunikasi dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat melalui koordinasi. Hal ini menunjukkan jalannya komunikasi berjalan baik dan memuat prinsip kerjasama. Sehingga jalannya parkir berlangganan semakin efektif dan meningkatkan PAD di Kota Probolinggo

2. Sumberdaya

Sumberdaya pada proses implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan untuk peningkatan PAD di Kota Probolinggo memuat sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan pendukung. Pengoptimalan sumber daya secara bijak mampu mewujudkan pelaksanaan parkir berlangganan secara baik dan mampu meningkatkan PAD di Kota Probolinggo.

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan parkir berlangganan menunjukkan kompetensi dari pemangku jabatan, aparatur, dan petugas di lapangan. Pemangku jabatan memahami akan adanya kebijakan dalam parkir berlangganan akan menguntungkan masyarakat. Artinya dari masyarakat dan untuk masyarakat. Aparatur yang bertugas juga memiliki kompetensi dalam mendata dan mengolah data yang ada untuk meminimalisir

kesalahan data dan keuangan. Serta petugas lapangan akan paham tidak menarik biaya parkir pada pemilik kendaraan dengan tanda khusus parkir berlangganan. Pengoptimalan sumber daya manusia ini membentuk pengaruh positif pada pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan dan mengalokasikan hasil pada PAD dengan tepat. Tidak ada lagi parkir liar dan pemungutan liar yang justru hasil retribusi parkir tidak masuk pada PAD Kota Probolinggo.

Sementara sumber daya anggaran atau finansial serta fasilitas ditujukan sebagai nilai modal dalam pelaksanaan kebijakan dengan anggaran yang digunakan secara bijak dan tepat sasaran mampu menjadikan anggaran meningkatkan penyelenggaraan kebijakan dan meningkatkan PAD Kota Probolinggo. Selain itu fasilitas yang digunakan semakin modern mampu mengelola data dan keuangan semakin transparan dan jelas. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi PAD Kota Probolinggo.

Sumber daya pendukung adalah bentuk lain seperti strategi dalam menyebarluaskan informasi parkir berlangganan di Kota Probolinggo. Sehingga tidak menciptakan kesimpangsiuran dan kesalahpahaman di masyarakat. Masyarakat akan lebih diuntungkan dengan bentuk parkir berlangganan. Serta hasil dari parkir berlangganan akan langsung masuk pada instansi tidak melalui perseorangan lagi.

3. Disposisi

Disposisi pada implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan untuk peningkatan PAD di Kota Probolinggo memuat sikap para pelaksana sesuai dengan loyalitas dan kejujuran pelaksana. Semakin baik pelaksana dengan loyal dan jujur membentuk kepercayaan masyarakat sehingga akan lebih mudah masyarakat mengikuti program parkir berlangganan Kota Probolinggo dan secara otomatis kas daerah semakin meningkat karena tidak penyelewengan dana kembali. Serta dedikasi tinggi dari petugas parkir yang tidak memungut parkir pada kendaraan bertanda parkir langganan akan membentuk kondisi selaras dan tidak menguntungkan individu. Hal ini terlihat pada beberapa masyarakat Kota Probolinggo yang merasa diuntungkan dengan adanya parkir berlangganan, cukup membayar setiap bulan dan tidak ditarik biaya parkir lagi. Terlebih bagi pihak yang sering memanfaatkan parkir karena kegiatannya. Masyarakat Kota Probolinggo yang lebih memilih parkir berlangganan membuat kondisi PAD Kota Probolinggo meningkat karena biaya parkir masuk langsung PAD. Karena tidak membayar ke juru parkir, dikumpulkan pada kelompok area baru masuk pada PAD. Maka alur keuangan lebih jelas dan meminimalisir korupsi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur pada proses implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan pada peningkatan PAD di Kota Probolinggo memuat mekanisme dan struktur birokrasi pelaksana kebijakan. Mekanisme pada implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kota Probolinggo memuat standart operational procedur (SOP) dan juklak. Pembagian kewenangan dan tugas secara jelas mampu menjalankan kebijakan parkir berlangganan secara efisien dan efektif dalam penanganan saat terjadi permasalahan sebagai penghambat kebijakan. Selain itu struktur birokrasi jelas terlihat pada tupoksi serta SOP yang dilakukan oleh pelaksan parkir berlangganan di Kota Probolinggo.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil riset maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020) Dilaksanakan sesuai dengan teori George C. Edwards III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi antar pemangku jabatan, masyarakat, pihak swasta dan organisasi masyarakat dilakukan dengan koordinasi dan sosialisasi menyeluruh dan berkala. Pemanfaatan sumber daya yang dioptimalkan secara bijak. Deposisi dengan model sikap loyalitas dan kejujuran para pelaksana membentuk dedikasi yang dipercaya masyarakat. Serta struktur birokrasi dengan SOP dengan jelas dalam pembagian tugas wewenang mampu menjalankan kebijakan dengan baik dan selaras.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Setiadewi, Tjokorda Isteri Rai, and Ida Ayu Putu Sri Widnyani. 2019. "Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Klungkung." *Jurnal Widya Publika* 7 (1): 25–37. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v7i1.627>.
- Ardiansyah, Roy, Sundarso, and Tri Yuniningsih. 2016. "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan." *Journal of Public Policy and Management Review* 5 (2): 5–24.
- Balahmar, Ahmad Riyadh U. 2016. "Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Sidoarjo." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 1 (2). https://www.researchgate.net/publication/309743332_167_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PARKIR_BERLANGGANAN_DALAM_MENUNJANG_PENDAPATAN_ASLI_DAERA

- Ekaryn, Hilda Happy, Augustin Rina Herawati, and Dyah Hariani. 2022. "MANAJEMEN PARKIR UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG." *E-Journal Undip* 1 (1).
- Ferisiansyah, Try, and Suci Megawati. 2022. "Implementasi Kebijakan Program Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang." *Publika* 9 (5): 75–86. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n5.p75-86>.
- Jiwangga, Yoga Kukuh. 2018. "Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)." Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165605/>.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurachman, Maman. 2023. "Analisis Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Periode 2021-2022 (Studi Empiris Kabupaten Sumedang)." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1 (4): 97–104. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>.
- Nuryamin. 2016. "Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kantor Samsat Makasar." Universitas Hasanuddin.
- Rukmana, Novayanti Sophia, and Gita Susanti. 2015. "Kerjasama Publik Dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar." *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)* 1 (1): 127–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.1021>.
- Salim, Noor. 2013. "Kajian Manajemen Transportasi Pada Daerah Pelabuhan Perikanan (Studi Kasus Di Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Probolinggo)." *Jurnal IISEI Jember* 3 (1): 303–15.
- Siregar, Nurmayana. 2022. "Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)." *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial* 1 (7): 713–22. <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320/2430>.
- Susanti, Dyah Ratna. 2016. "Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan (Studi Tentang Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Wilayah Kampus Universitas Jember)." Universitas Jember.
- Susanto, Eko Budi, Satriedi Wahyu Binabar, and M. Reza Maulana. 2017. "PROTOTIPE E-PARKIR UNTUK Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan." *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 13.
- Suwandi. 2019. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Terhadap Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batam)."

UP Batam.

Swisti Intan Nurcahyamita. 2019. "Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Periode 2015-2018 (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Pemalang)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110>.